



## **Analisis Konflik Arab Spring di Suriah**

### ***The Analysis of Conflict Arab Spring in Syria***

**Muhammad Ridho, Yanyan Muhamad Yani & Arfin Sudirman**

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas  
Padjajaran, Indonesia

Diterima: 20 Desember 2019; Disetujui: 23 Februari 2020; Dipublish: 30 April 2020

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena konflik Arab spring yang terjadi di Suriah dan memaparkan faktor-faktor pemicu konflik Suriah serta analisis kelompok alawie di Suriah. Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, karena teknik pengumpulan data yang digunakan menjadikan buku dan dokumen terkait Arab Spring di Suriah sebagai kerangka acuan, serta beberapa data dari website yang valid. Teknik analisis data melalui tiga komponen yakni reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dimana di dalamnya disertai pula verifikasi data dengan triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena Arab Spring yang terjadi di Suriah mengerucut kepada konflik antar etnis yang terjadi antara sunni-alawie, kemudian dipicu dengan adanya fenomena Arab Spring yang merebak di kawasan timur tengah.

**Kata Kunci:** Konflik, Arab Spring, Suriah

#### **Abstract**

*This study aim to explain phenomenon of Arab spring that occurred in Syria and describing the triggering factors of conflict Syria and the analysis of Alawie group in Syria. The type of this study uses a qualitative approach with the literature study method, because the data collection techniques used make books and documents related to the Arab spring in Syria as a reference frame, as well as some data from a valid website. Data analysis techniques through three components, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions in which data verification is also accompanied by triangulation of data sources. The results showed that the phenomenon of Arab spring that occurred in Syria converged on inter-ethnic conflict that occurred between the Sunni-Alawie, then triggered by the phenomenon of Arab spring that spread in the Middle East.*

*Keywords:* Conflict, Arab Spring, Syria

**How to Cite:** Ridho, M, Yani, Y.M & Sudirman, A (2020): Analisis Konflik Arab Spring di Suriah. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 12(1): 113-122.

---

\*Corresponding author:

E-mail: [moh.ridho94@yahoo.com](mailto:moh.ridho94@yahoo.com)

ISSN 2085-482X (Print)

ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN

Fenomena Arab *spring* atau musim semi Arab adalah istilah politik yang sangat ramai diperbincangkan dalam politik internasional, khususnya di kawasan Arab, sejak awal tahun 2011. Istilah yang bermakna jatuhnya rezim-rezim pemimpin otoriter di tanah Arab, dimulai dari jatuhnya Zein Al-Abidin bin Ali (Ben Ali) di Tunisia, kemudian Hosni Mubarak di Mesir, lalu runtuhnya era kediktatoran Moammar Khadafi yang sudah berlangsung hampir 40 tahun di Libya, dilanjutkan oleh Yaman, Bahrain, dan Suriah yang masih berlangsung sampai sekarang (Sahide, Cipto, Muti'ah Setiawati, & Hadi, 2015).

Pada sebuah negara yang terjadi pemberontakan di dalamnya, melihat siapa yang memiliki atau tidak memiliki keinginan untuk melawan kelompok yang berkuasa, itu merupakan sebuah bukti untuk pengkajian. Adapun pemberontakan yang terjadi di Suriah, besarnya keinginan oposisi rezim yang berkuasa dapat menjadi acuan dalam mengkaji pemberontakan tersebut.

Dampak dari fenomena Arab *spring* yang melanda beberapa negara di kawasan timur tengah memberikan pengaruh yang sangat besar pada keadaan sosial dan politik Suriah. Ketika rakyat tidak lagi mengakui kedaulatan rezim yang berkuasa karena didorong rasa ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Berbagai kegiatan korupsi, kesewenangan dalam menegakan peraturan dan kesenjangan ekonomi yang tinggi menjadi alasan untuk gerakan revolusi rakyat dalam upaya menggulingkan pemerintahan yang ada kemudian menggantinya dengan yang baru.

Pada akhir tahun 2010 gelombang Arab *spring* terjadi, Tunisia merupakan negara pertama yang dilanda gelombang Arab *spring* tersebut. Dalam kurun waktu yang cukup cepat gelombang Arab *spring* menyebar ke negara-negara di kawasan timur tengah termasuk Suriah. Melalui dunia maya fenomena Arab *spring* menyebar dengan cepatnya, seakan menyadarkan negara lain bahwa relevansi antara otoriterianisme dengan keadaan sosial dan politik saat ini sudah tidak ada. Akibatnya informasi tentang para aktivis yang menyuarakan pro demokrasi dengan lantang tersebar luas melalui internet (Hermawan, 2016).

Saat gelombang protes terjadi di Tunisia dan Mesir para aktivis pembebasan di kedua negara tersebut menyebarkan revolusi Arab *spring* melalui internet. Hal tersebut seakan mencoba menyadarkan seluruh negara di kawasan timur tengah untuk bangun dan bergerak melawan rezim otoriter, khususnya Suriah.

Seruan untuk melakukan demonstrasi besar-besaran di Suriah terpampang pada beberapa situs sosial media seperti facebook dan twitter di awal Februari 2011, isinya mengajak para demonstran untuk menuntut pemerintah agar segera melakukan reformasi pada tanggal 4 dan 5 Februari. Terdapat pula bantuan dari aktivis pro-demokrasi Tunisia dan Mesir berupa komputer, paket modem satelit, telepon seluler dan alat sosial media lainnya sebagai persiapan apabila terjadi peristiwa besar layaknya di Tunisia dan Mesir. Akan tetapi, beberapa hari sebelum jadwal demonstrasi besar-besaran tersebut intel Suriah melakukan kontak kepada para aktivis dengan penekanan agar tidak melakukan

demonstrasi yang sudah dijadwalkan tersebut (Sulaeman, 2013).

Alasan dibalik ditentukan tanggal 4 dan 5 Februari 2011 ialah untuk mengenang tragedi pemberontakan ikhwanul muslimin di kota Hama pada tahun 1982 (Kuncahyono, 2014). Sebenarnya apa yang diharapkan aktivis pro demokrasi di Suriah adalah adanya perubahan secara damai tanpa harus terjadi perang saudara. Akan tetapi, ketika terjadi kasus penangkapan 15 pelajar di Kota Deraa yang menuliskan *Ash-sha`b yurid isqat an-nizam* (Rakyat ingin menumbangkan rezim ini) merubah segalanya. Tuntutan keadilan oleh rakyat dilakukan melalui demonstrasi terhadap Faisal kalthoum selaku gubernur kota Deraa, disambut dengan aparat keamanan yang bertindak represif. Bahkan situasi semakin rusuh ketika tembakan senjata api dilepaskan aparat keamanan untuk menjatuhkan para demonstran (Herlambang, 2018). Ditemukan korban jiwa dari insiden tersebut di pihak demonstran.

Demonstrasi terus berlanjut dengan tuntutan untuk membebaskan 15 pelajar yang ditahan dan menuntut kebebasan politik. Walaupun aspirasi para demonstran tidak didengar dan kerap dihadang oleh petugas keamanan, mereka tetap berjuang karena wadah aspirasi rakyat dinilai sudah tidak ada pasca kasus Damaskus *Spring* yang terjadi di awal tahun pemerintahan Bashar al-Asad (Rodrigues, 2011).

Pemerintah pusat mulai bergerak karena keinginan para demonstran semakin beragam. Dengan segera Bashar al-Asad mengirim utusan untuk menemui keluarga dari 15 pelajar yang ditahan. Anggota intelijen militer Suriah, Jendral

Rustom Ghazali menjamin keadaan Kota Deraa akan kembali normal, 15 pelajar yang ditahan akan segera dibebaskan dan petugas keamanan yang bertindak brutal akan segera diberikan sanksi yang berat (Rodrigues, 2011).

Selama di dalam tahanan 15 pelajar tersebut mengaku kerap disiksa oleh petugas keamanan dan hal itu membuat pihak keluarga marah hingga memicu demonstrasi yang lebih besar. Masjid menjadi tempat berkumpul dan menyusun rencana oleh rakyat yang akan melakukan demonstrasi, masjid Omari yang berada tepat di tengah kota Deraa menjadi pilihan. Hal tersebut diketahui oleh pasukan pengamanan Kota Deraa, serangan pun dilakukan untuk menangkap para demonstran yang sedang berkumpul di dalam masjid Omari. Akan tetapi, penyerangan tersebut berujung anarkis hingga akhirnya pasukan pengamanan melepaskan tembakan dan korban jiwa pun berjatuhan. Efek dari penyerangan tersebut membuat rakyat semakin geram dan tulisan anti rezim pun semakin banyak ditemukan di tempat umum (Kuncahyono, 2014).

Momentum dalam pelaksanaan upacara penguburan korban penembakan Masjid Omari digunakan untuk mengungkapkan perlawanan serta kekecewaan rakyat terhadap rezim yang berkuasa. Sehingga, demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai Kota termasuk dua Kota terbesar di Suriah, Aleppo dan Damaskus (Kuncahyono, 2014).

Lebih dari 250.000 orang telah menjadi korban pada konflik Arab *spring* di Suriah yang terus berlanjut. Laporan dari komisi tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR), ditemukan lebih dari 4,2 juta warga Suriah mengungsi ke berbagai

negara tetangga dan 7,6 juta mengungsi di negara mereka sendiri. Adapun menurut badan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menyebutkan, sekitar 893.970 orang warga Suriah masuk ke Eropa (Sahide et al., 2015).

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Berbagai prosedur tertentu akan digunakan dalam penelitian ini dengan peneliti sebagai aktor utamanya (Creswell, 1994). Metode ini dianggap lebih memungkinkan peneliti untuk mengungkap sebuah realitas di balik fenomena yang diangkat dalam penelitian yaitu bagaimana konflik *Arab spring* di Suriah terjadi.

Tulisan ini memfokuskan pada kajian Studi pustaka. Penelusuran studi pustaka, yakni menggunakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian (Nasir, 2003). penulis membaca karya-karya yang terkait dengan tema yang diangkat, *The Arab Spring* dengan fokus penulis mengkaji fenomena *Arab Spring* di Suriah. Penulis memilih Suriah karena Suriah belum berhasil menggulingkan rezim Bashar al-Assad yang otoriter. Dokumen berbentuk *press release* yang dikeluarkan oleh pemerintah, berita dan media online yang terkait dengan isu *Arab spring* dan konflik Suriah dapat menjadi acuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor-Faktor Pemicu Konflik Suriah

Adapun akibat dari kebijakan pemerintah Suriah, pemerintahan Hafiz al-

Asad dan Bashar al-Asad telah melahirkan sebuah gelombang revolusi di negara tersebut. Faktor pemicu konflik di Suriah yang dianggap kebal dari revolusi, justru menjadi negara yang paling lama mengalami pemberontakan karena konflik internal yang belum terselesaikan.

Terdapat tiga faktor utama yang menjadi pemicu konflik Suriah yaitu pertama, Kebijakan pada masa Bashar al-Ashad yang diteruskan oleh Hafiz al-Asad telah mengalami perubahan, pada masa Hafiz al-Asad sebagai presiden seperti kedudukan tentara Suriah di Lebanon yang pada pemerintahan Bashar al-Asad telah berkembang menjadi penarikan pasukan militer Suriah dari negara tersebut akibat biaya operasi militer dan tuntutan rakyat Lebanon agar Suriah tidak perlu ikut campur akan masalah negara mereka (Ghadbian, 2001).

Tentara keamanan dibayar sebesar 40 dolar sehari untuk memata-matai segala aktivitas dan membuat negara harus menghabiskan sepertiga anggaran belanja negara untuk kebutuhan militer. Anggaran belanja Suriah menghabiskan 50 persen untuk mendanai kebutuhan pasukan militer dan pemerintah Suriah jadi lebih memerhatikan kondisi militer daripada kesejahteraan rakyatnya. (Ghadbian, 2001).

Kedua adalah faktor ekonomi. Sejak masa pemerintahan Hafiz al-Asad dan Bashar al-Asad dengan kondisi rezim yang penuh dengan korupsi dan pegawai pemerintahan yang haus suap mengakibatkan krisis ekonomi bagi rakyat Suriah.

Pada pemerintahan Hafiz al-Asad banyak permasalahan seperti, korupsi, kelebihan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan jumlah lapangan kerja, inefisiensi

atau tidak tepat guna dalam mengelola keuangan negara menyebabkan perekonomian Suriah tertinggal jauh dengan negara-negara sekitarnya. Pendapatan Lebanon yang mencapai angka 3.000 dollar, dan Israel 17.000 dollar sedangkan Suriah hanya sekitar 1.000 dollar, berbeda jauh dengan Pengangguran, diperkirakan berjumlah sekitar 22%, dan negara membelanjakan lebih dari 7% dari PNB dan hampir 50% dari anggaran adalah untuk pembiayaan militer dan pasukan keamanan. Hal tersebut semakin parah dengan terbatasnya sumber daya alam, jumlah militer yang terlalu besar, berkurangnya bantuan luar negeri, korupsi, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu sekitar 3.15% (Ghadbian, 2001).

Kondisi perekonomian Suriah pada saat Bashar al-Asad yang berkuasa sangat buruk. PDB per kapita turun selama 1980 hingga tahun 1990. Kemudian, Bashar al-Asad menjanjikan akan melakukan reformasi ekonomi. Pada tahun 2005, Bashar al-Asad memperkenalkan reformasi ekonomi dengan istilah ekonomi pasar sosial yang mengalihkan perekonomian yang dikelola oleh pemerintah menjadi perekonomian liberal. Liberalisasi ekonomi memberikan kemakmuran pada sejumlah kota besar seperti Damaskus dan Aleppo, namun tidak dapat merata dan menyebar ke daerah-daerah kecil atau kota-kota lain.

Sistem ekonomi Suriah dikuasai oleh tiga kelompok. Pertama, para manager di sektor publik, pengusaha kecil, dan kelompok pelindung pengusaha 77 yang juga tergabung dalam kelompok keamanan dan militer. Kelompok-kelompok tersebut mendapat hak istimewa dalam perekonomian Suriah. Dan siapapun yang

tergabung dalam pasukan militer atau pun pengamanan tidak akan tersentuh oleh hukum sehingga korupsi beredar di wilayah pasukan keamanan tersebut. Kesenjangan ekonomi semakin dirasa ketika tidak semua lapisan masyarakat dapat bergabung dengan pasukan keamanan tersebut, karena mazhab yang dianut juga berpengaruh dalam penerimaan untuk menjadi pasukan keamanan. Dari 200.000 tentara militer Suriah, sekitar 70% adalah Alawie.

Para pegawai negeri yang disuap adalah orang memberikan kuasa untuk mengantarkan barang dan jasa sudah menjadi sistem korupsi di Suriah. Perkembangan penduduk juga tidak setara dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya alam yang semakin menipis. Pada tahun 1975, angka kelahiran mencapai 50 kelahiran hidup per 1000 orang. (Kuncahyono, 2014) Angka kelahiran yang begitu tinggi adalah akibat dari kebijakan yang diterapkan pemerintah Suriah tentang pelarangan penggunaan alat kontrasepsi dan berpendapat bahwa angka pertumbuhan yang tinggi dan migrasi internal akan menjadi stimulasi kemajuan sosial dan ekonomi dalam kerangka pembangunan.

Produksi minyak per hari pada tahun 2010 hanya 385.000 barrel, jauh di bawah tahun 1996 yaitu, 583.000 barrel. (Kuncahyono, 2014) Banyak industri-industri produktif yang sebelumnya mampu menyerap banyak tenaga kerja muda dibongkar dibawah pemerintahan Bashar al-Asad, sehingga pertumbuhan pengangguran pada usia kerja terus meningkat. Orang-orang yang berkuasa dan memiliki hubungan dengan rezim perekonomian berubah menjadi perekonomian rente. Perubahan iklim

yang ekstrem sepuluh tahun belakangan ini membuat Suriah dan negara Timur Tengah semakin kering. (Kuncahyono, 2014) Hal tersebut berpengaruh kepada sektor pertanian yang menghasilkan 20 persen GDP Suriah. Karena semakin buruknya kondisi perekonomian, perlahan muncul rasa ketidakpuasan di dalam masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, mulai dari kelompok ekonomi terpinggirkan.

Ketiga, isu Sunni-Alawie di Suriah. Usai perang dunia pertama, aliansi kelompok yang menang dalam perang tersebut, Inggris dan Perancis, membagi provinsi Arab yang pada saat itu dikuasai oleh Kerajaan Ottoman menjadi beberapa bagian. Di bagian selatan tepatnya di Palestina, menjadi milik Inggris. Sedangkan di utara tepatnya di Suriah dan Lebanon menjadi milik Perancis. Suriah dibagi lagi menjadi enam bagian yaitu; Aleppo, Hama, Horns, Damaskus, Jabal al-Druze, dan Latakia. Begitupun dengan Lebanon yang juga dibagi menjadi 4 bagian yaitu; Tripoli, Beirut, Sidon, dan Tyre (Fildis, 2012).

Pada tahun 1920 sampai tahun 1946 kependudukan Perancis di Suriah sekte atau aliran keagamaan berkembang liar sehingga menimbulkan tekanan bagi nasionalisme Arab dan menahan laju gerakan kemerdekaan di negara tersebut. Separatisme, partikularisme keagamaan, dan primordialisme memberikan usul untuk dilakukan otonomi daerah dimana kelompok minoritas menjadi mayoritas di wilayah tersebut.

Paham Nasionalisme Arab dikembangkan oleh Kelompok muslim Sunni merasa terancam atas kependudukan dan kebijakan Perancis maupun Kristen dan juga kelompok

muslim yang dianggap menyimpang seperti Druze, Ismaili, dan Alawie. Tujuan politik dari kelompok Nasionalisme Arab (Pan Arab) ialah merdeka dan di bawah satu naungan pemerintahan. Tujuan tersebut bertentangan dengan keinginan Perancis dan kelompok minoritas lain yang ada di Suriah. Karena, arogansi kelompok Sunni Arab akan membuat pemerintahan menjadi berkelas-kelas dan memomorduakan kelompok minoritas selain Sunni Arab sebagai kelompok Arab yang tidak sempurna.

Oleh karena itu, pemerintah Perancis di Suriah memelihara hubungan baik dengan kelompok-kelompok Druze, Alawie, dan beberapa kelompok minoritas lainnya. Pemerintah Perancis mengabdikan dua daerah otonomi di Suriah untuk dua kelompok minoritas Druze dan Alawie.

Pada tahun 1922, wilayah Jabal al-Druze memisahkan diri di bawah perlindungan Perancis. Setelahnya, wilayah yang terletak di Druze, selatan Damaskus, ini dipimpin oleh gubernur dan anggota kongres yang telah terpilih. Wilayah pegunungan di Latakia kebanyakan dihuni oleh populasi Alawie dan merupakan rezim administrasi khusus di bawah Perancis dengan mendeklarasikan sebagai negara terpisah.

Pemerintah pendudukan Perancis menerapkan setidaknya dua kebijakan di wilayah tersebut. Pertama, kebijakan *divide and rule* diterapkan guna menghindari Nasionalis Arab melakukan invasi daerah yang ditinggali oleh kelompok minoritas. Kedua, hubungan antara pihak oposisi nasionalis di perkotaan dan 83 daerah pinggiran harus diputus. Alhasil, kebijakan ini menyebabkan upaya perluasan aktivitas di

luar Damaskus, Aleppo, Hama, dan Homs yang dilakukan oleh pergerakan nasionalis Suriah menjadi terkendala.

Alih-alih mengupayakan jalannya administrasi yang efisien serta para elite yang berdedikasi, pemerintah pendudukan Perancis justru memperburuk jalinan hubungan antara Sunni Arab yang merupakan kelompok mayoritas dengan beberapa kelompok minoritas. Satu alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yakni Perancis tidak sungguh-sungguh menarik kendalinya di Suriah.

Lebih jauh, hubungan antar golongan, etnis, serta kaum religius di Suriah semakin rusak dan saling menyerang satu sama lain (Fildis, 2012). Hal ini tidak lepas dari ulah Perancis yang memisahkan etnis-etnis sebagai kepala lembaga pemerintahan yang berbeda. Tiap etnis atau kelompok keagamaan didorong hanya untuk mewakili etnis atau kelompoknya sendiri dalam lembaga tersebut. Sebagai contoh, kelompok Sunni Arab lebih menguasai bidang politik dan kepolisian, sedangkan etnis lain seperti Circassian (Kaukasus) dan Alawie mengisi pos di bidang militer.

Kisruh elite politik mewarnai keseharian kehidupan perpolitikan di Suriah. Pemimpin satu kota dengan pemimpin di kota lain, atau antara pemimpin perkotaan dan pedesaan saling bertentangan. Hal ini tidak lepas dari pertentangan Pan-Arab dengan kepentingan lokal yang dihadapi oleh kelompok Nasionalis Arab.

Sebelum merdeka, Blok Nasional (*al-Kutla al-Wataniya*), sebuah persatuan veteran, menjadi wadah bagi gerakan nasionalis Suriah. Keduanya mempunyai latar belakang dan ketertarikan untuk bersatu berjuang untuk mencapai

kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, kelompok Sunni yang mewarisi pemerintahan Suriah dari tangan Perancis melakukan beberapa perubahan. Wilayah minoritas dan perwakilannya di tingkat parlemen yang diraih saat pendudukan Perancis dihapuskan, dan beberapa kebijakan hukum yang mengabulkan entitas kaum Alawie dan Druze pada masa kepemimpinan Perancis turut dihapus.

Kebijakan di bidang hukum yang dihapuskan bertujuan untuk mendirikan pusat kekuasaan di Damaskus dan mempertentangkan antar kelompok minoritas. Lebih lanjut, Kota Latakia dan negara Alawie disatukan ke dalam negara Suriah. Dengan demikian, kursi di parlemen dan pengadilan tinggi yang sebelumnya berlaku di bawah hukum Alawie di hapuskan. Tanpa adanya lagi dukungan dari Perancis, Alawie bersedia melaksanakan kebijakan tersebut guna mendapatkan pengakuan kewarganegaraan Suriah.

### **Analisis Kelompok Alawie**

Sejak era kerajaan Ottoman, Alawie menjadi kelompok minoritas miskin dan selalu terpinggirkan. Saat Perancis menjadikannya sebagai negara Alawie, Latakia, pada 1 Juli 1922, Alawie yang sebelumnya dikenal dengan Nusyaris atau Ansaris mendapatkan hal otonom yang legal.

Sebelum kedatangan Perancis, kaum Alawie bekerja di pegunungan Latakia di tanah-tanah yang dimiliki oleh kelompok Sunni dan Kristen. Hal ini diperparah dengan kondisi geografis yang jauh dari perkotaan yang dikuasai oleh kelompok Sunni. Situasi yang berbeda dirasakan saat Perancis menduduki Suriah. Alawie mempunyai pasukan *Troupes Speciales* du

Levant, sebuah pasukan militer lokal yang dibangun pada tahun 1921 dan menjadi cikal-bakal pasukan keamanan Suriah-Lebanon. Namun, prinsip *divide and rule* dari Perancis membatasi kelompok-kelompok etnis tersebut mendapatkan posisi kekuasaan penuh yang membahayakan kedudukan Perancis di Suriah (Faksh, 1984).

Pasukan militer terdiri dari kaum Alawie, Druze, Kurdi, dan Circassian (Kaukasus) yang merupakan perwakilan minoritas untuk membangun pedesaan yang kuat. Hal tersebut dilakukan Perancis karena menganggap mayoritas Sunni Arab telah menjadi Nasionalis Arab yang akan mengganggu mereka dalam memenangkan hati kaum urban Suriah.

Kebijakan Perancis dalam bidang militer ini melemahkan pasukan nasionalisme Arab Sunni serta menurunkan representasinya dalam pasukan militer. Padahal, pasukan nasionalisme sebelumnya digunakan untuk menantang pendudukan negara tersebut.

Pasukan dari kaum minoritas melalui *Troupes Speciales du Levant* digunakan untuk memelihara pemerintah, menekan pemberontakan lokal, dan menanamkan kebencian dengan Sunni (Fildis, 2012). Pasukan ini sangat ampuh sebagai kendaraan gerakan sosial mengingat kondisi ekonomi yang mereka hadapi.

Dalam perkembangannya, pasukan infantri dan *battalion* hanya diisi oleh kaum Alawie. Hanya sedikit kelompok Sunni yang menjadi bagiannya, itu pun diisi oleh kelompok Sunni yang kebetulan tinggal jauh dari perkotaan. Hal ini terjadi juga akibat dari keengganan kelompok Sunni, yang didominasi oleh tuan tanah dan pemimpin gerakan nasionalis Arab,

enggannya mengirim putra-putri mereka untuk bergabung ke latihan militer dengan alasan bahwa mereka hanya akan melayani kepentingan Perancis.

Di sisi lain, kesempatan untuk bergabung ke pasukan militer ini telah mengubah hidup kelompok Alawie. Hidup mereka telah berubah di mana sebelumnya hanya berpendapatan 22 piastres yang tidak cukup memenuhi biaya standar hidup. Uang yang rutin mereka terima sebagai pasukan militer telah menjadikan mereka disiplin, terlatih, dan membuka gagasan-gagasan baru bagi kemajuan pasukan tersebut. Kaum Alawie beranggapan bahwa melayani pemerintah Perancis menjadi perubahan nasib mereka.

Meski demikian, posisi yang bisa diraih oleh mereka hanyalah kopral, sersan, dan perwira muda yang pada akhirnya diambil alih oleh partai Ba'ath pada tahun 1963. Kelompok Sunnilah yang sebenarnya menjalankan politik dan strateginya dan mempunyai posisi penting dalam infantri *battalion*.

Menempati posisi penting dalam pasukan militer telah memudahkan kelompok Sunni mengambil alih militer. Pemimpin tiga kudeta pertama antara 1949 hingga 1954 semuanya dari kelompok Sunni. Saat Suriah dan Mesir bersatu menjadi Persatuan Republik Arab (*United Arab Republic*) dalam periode antara 1954 dan 1958, para petugas kepolisian dibagi ke dalam golongan yang saling berlawanan. Hal ini justru menguntungkan kelompok Alawie ketika para perwira senior Sunni dilemahkan oleh keterwakilan kelompok Sunni pada kesatuan militer. Kelompok Alawie mulai mewarisi posisi mereka dan mengalami kenaikan jabatan dan dengan segera menarik kerabatnya untuk menduduki

jabatan-jabatan di sekelilingnya. Pada akhirnya, kelompok Alawie mampu menguasai Militer dan partai Ba'ath untuk menambah kekuasaan dan mengambil alih kehidupan politik Suriah.

Sesaat setelah Perancis menarik pasukannya dari Suriah pada April 1946, kelompok Nasionalis Arab melakukan upaya untuk menyatukan negara-negara Arab; salah satunya dengan cara melarang partai politik yang tumbuh saat masih di bawah pendudukan pasukan Perancis. Kelompok Alawie tidak mengindahkannya dan tetap menjalankan roda organisasi Ba'ath secara sembunyi-sembunyi. Mereka yakin bahwa Suriah akan melepaskan diri dari persatuannya dengan Mesir yang pada akhirnya terjadi pada tahun 1961 (Sorenson, 2016).

Saat terjadi kekosongan dalam pemerintahan, partai Ba'ath muncul ke permukaan sebagai partai yang siap memimpin Suriah karena mereka telah memiliki akar pada saat Suriah dan Mesir bersatu. Pemimpin kelompok; Salah Jadid, Hafez al-Asad, Muhammad Umran, kesemuanya merupakan anggota Alawie, dan Hamad Ubayd merupakan kelompok Druze. Organisasi tersebut bertujuan memulihkan pasukan Suriah ke dalam kekuasaan Suriah. Anggota organisasi rahasia ini belakangan diketahui sebagai anggota militer, yang tidak termasuk ke dalam struktur pengurus partai Ba'ath, namun saat organisasi tersebut kosong, kepengurusan partai diambil alih oleh mereka.

Kehidupan politik saat kelompok Alawie menguasai Suriah ditandai dengan pemberian posisi strategis dalam militer dan pemerintahan pada anggota keluarga mereka. Dalam urusan bisnis, orang-orang

yang dekat dan keluarga juga mendapatkan berbagai kemudahan.

Kekuasaan telah mengubah kelompok Alawie. Mereka sebelumnya hanyalah rakyat kelas paria berprofesi sebagai buruh tani atau pekerja kasar saat masih era kerajaan Ottoman dan pendudukan Perancis.

Untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin Partai Ba'ath dan presiden, pada tahun 1970, Hafez al-Asad menjalankan pemerintahan yang sekuler. Hal ini mendapat penolakan dari berbagai kelompok, utamanya dari kalangan Sunni (Sorenson, 2016).

Pada tahun 1976 sampai 1982, kelompok Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*) memimpin pemberontakan di kota Hama untuk melawan rezim yang berkuasa. Pada Februari 1982, pemerintah Suriah membombardir kota tersebut hingga tidak ada lagi yang berani untuk menentang rezim Hafez al-Asad.

Hafez al Asad meninggal dunia pada 10 Juni 2000 karena faktor usia setelah berkuasa selama 30 tahun. Bashar al-Asad melanjutkan kepemimpinan sang ayah dengan mengubah konstitusi negara yang menetapkan usia minimum presiden pada usia 40 menjadi 34, sesuai dengan usia Bashar saat itu. Pada 10 Juli 2000, referendum nasional untuk pemilihan calon tunggal Bashar al-Asad sebagai Presiden Suriah dilakukan (Heydemann, 2013).

Kekuasaan Hafez al-Asad dan Bashar al-Asad membawa pengaruh baik untuk pendidikan kelompok minoritas, terutama Alawie. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya universitas di Suriah yang diisi oleh dosen-dosen dari kelompok Alawie.

## SIMPULAN

Gejolak Arab Spring di kawasan Arab menjadi gambaran perlawanan rakyat di tengah pemimpin atau pemerintahan otoriter. Pergolakan tersebut didorong oleh tiga faktor, yakni kebijakan militer Suriah, kesenjangan ekonomi di masyarakat, serta konflik Sunni-Alawie. Perkembangan teknologi melalui media sosial menjadi bahan bakar yang menyulut gerakan demonstrasi remaja dan konflik di Suriah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (1994). *Research design qualitative and quantitative approaches*. London: SAGE Publication.
- Faksh, M. A. (1984). *The Alawi Community of Syria: A New Dominant Political*. Abingdon: Taylor and Francis group.
- Fildis, A. T. (2012). Roots of Alawite-Sunni Rivalry in Syria. *Middle East Policy*, 19(2), 148-156. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4967.2012.00541.x>
- Ghadbian, N. (2001). The new Asad: Dynamics of continuity and change in Syria. *Middle East Journal*.
- Herlambang, A. (2018). Mengurai Benang Kusut Konflik di Suriah. *JURNAL TRANSBORDER Vol 1 No 2*, Hal 83.
- Hermawan, S. (2016). KONFLIK DI SURIAH PADA MASA BASHAR AL-ASSAD TAHUN 2011-2015.
- Heydemann, S. (2013). Syria and the Future of Authoritarianism. *Journal of Democracy*, 63. <http://www.dw.com/id/anggaran-belanja-senjata-dunia-terus-meningkat/a-3340680>  
<http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Keamanan%20Nasional%20Pertahanan%20Negara%20-%20koesnanto%20anggoro.pdf>  
<https://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/sa-budget.html>
- Kuncahyono, T. (2014). Musim Semi di Suriah: Anak-anak Sekolah Penyulut Revolusi.
- Nasir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rodrigues, J. (2011, August 1). 1982: Syria's President Hafez Al-Assad crushes rebellion in Hama. Retrieved from The Guardian
- Sahide, A., Cipto, B., Muti'ah Setiawati, S., & Hadi, S. (2015). The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktornya Penyebabnya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2), 118-129. <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0072.118-129>
- Sorenson, D. S. (2016). *Syria in Ruins*. California: Praeger.
- Sulaeman, D. Y. (2013). *Prahara Suriah*. Depok: Pustaka Iman.